

## **BAB II**

### **PERDEBATAN DISKURSUS HUBUNGAN ANTARA MILITER DAN SIPIL**

#### **A. Berdirinya TNI di Indonesia**

Akar pembentukan TNI sendiri bukan karena disengaja melainkan terbentuk dengan sendirinya (*self created army*). Artinya, TNI terbentuk bukan karena adanya campur tangan dari pemerintah, partai politik ataupun pemerintah kolonial. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakmauan elit sipil untuk membentuk tentara. Harapan pemerintah pusat yang di bawah pimpinan Soekarno yaitu bisa mencapai kemerdekaan secara damai. Akan tetapi, tentara Indonesia yang saat itu dimotori oleh pemuda beranggapan lain dengan Soekarno. Akhirnya, mereka mempunyai inisiatif untuk mempersenjatai diri dan mendirikan organisasi tentara sendiri dengan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.<sup>1</sup>

TNI berdiri berawal dari organisasi militer di Indonesia yang dimulai dari bawah sebagai BKR (Badan Keamanan Rakyat) bukan sebagai tentara reguler. BKR sendiri berdiri pada tanggal 22 Agustus 1945 yang merupakan

---

<sup>1</sup> Nurhasah Leni, "Keterlibatan Militer dalam Kacah Politik di Indonesia", *Jurnal Tapis* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2013, hlm. 33. Lihat juga Hadi Nafis Kamil, "Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998", *Skripsi*, (Jakarta: Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 30

hasil sidang dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)<sup>2</sup> yang terdiri dari unsur PETA, KNIL, Heiho, dll.<sup>3</sup>

1. PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) merupakan pasukan pembantu yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang di bentuk oleh Jepang dengan tujuan melawan pasukan sekutu.
2. KNIL (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*) merupakan tentara yang di bentuk oleh penjajah Belanda untuk kepentingannya sendiri.
3. Heiho merupakan pasukan pembantu kecil yang digunakan untuk tugas penjagaan, komandan-komandannya seluruhnya terdiri dari opsir-opsir jepang.
4. Laskar, merupakan para pemuda yang mendapatkan latihan militer dari Jepang selama pendudukan, yaitu:
  - a. Hizbullah, merupakan organisasi Islam di mana dalam organisasi tersebut berisikan para ulama dan santri yang dirangkul oleh Jepang. Tujuan dibentuknya Hizbullah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya dari Kolonial Belanda.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Febrinita Dwi Istyaningrum, "Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1997", *Skripsi*, (Semarang: Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2004), hlm. 34

<sup>3</sup> Hadi Nafis Kamil, "Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998", hlm. 31

<sup>4</sup> Jumeroh Mulyaningsih, Dedeh Nur Hamidah, "Laskar Santri Pejuang Negeri: Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya", *Tamaddun*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 3-4

- b. Sabilillah, merupakan salah satu barisan tentara paling kuat yang berasal dari golongan ulama, santri dan pesantren lain di seluruh wilayah Jawa Timur. Anggota dari laskar Sabillah tidak begitu banyak mendapatkan pengalaman dalam hal perang, tetapi semangat dan keberanian yang tinggi membuat laskar ini menjadi garis terdepan pertempuran.<sup>5</sup>

Tujuan di bentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yaitu untuk memelihara keamanan bersama-sama rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. BKR sendiri ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) sesuai dengan jenjang-jenjangnya.<sup>6</sup> Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho, sedangkan BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang) bertugas untuk menampung para mantan anggota PETA dan Heiho. Hal itu dipertegas dengan adanya seruan dari Soekarno menyebutkan bahwa:

*“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu di panggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”*

Setelah adanya seruan dari Presiden Soekarno maka diadakannya pemanggilan untuk bermusyawarah yang dilakukan oleh Camat kepada

---

<sup>5</sup> Rizky Wahyu Permana, “Sabilillah Laskar Ulama dan Santri Pejuang Kemerdekaan dari Malang”, <https://malang.merdeka.com/gaya-hidup/sabilillah-laskar-ulama-dan-santri-pejuang-kemerdekaan-dari-malang-161104o.html>, diakses pada 4 November 2016

<sup>6</sup> Ikrar Nusa Bhakti, dkk., *Tentara Mendamba Mitra: Hasil Penelitian LIPI tentang Pasang Surut Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 55

Kades/Lurah setempat. Mayoritas hanya di Pulau Jawa saja yang dapat mendengar pidato tersebut tidak semua daerah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya akses komunikasi yang masih sulit, sehingga daerah Sumatera bagian Timur dan Aceh tidak mendengar pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Akan tetapi, para pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API). Sementara itu, di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang berbeda yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).<sup>7</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR berkembang menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang kemudian tanggal tersebut diperingati sebagai hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>8</sup> Oerip Sumoharjo yang berpangkat Letnan Jenderal kala itu diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR. Perubahan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) berdasarkan dengan penetapan pemerintah Nomor 2 tanggal 7 Januari 1946. Perubahan nama tersebut bertujuan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Pada tanggal 25 Januari 1946 TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan ini bertujuan karena pemerintah ingin membentuk

---

<sup>7</sup> Joko Riyanto, "Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)", *Media Informasi Kementerian Pertahanan Indonesia Wira*, Vol. 56 No. 40, September-Oktober, 2015, hlm. 9-10

<sup>8</sup> Todiruan Dydo, *Pergolakan Politik Tentara: Sebelum dan Sesudah G30S/PKI*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1989), hlm. 1

<sup>9</sup> Joko Riyanto, "Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)", hlm. 12

suatu alat ketentaraan yang sempurna dengan mengambil teladan dari bangsa lain.<sup>10</sup> Kemudian Presiden mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Mei 1947 untuk membentuk suatu panitia yang diberi nama dengan “Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia”.

Setelah itu, pada tanggal 7 Juni 1947 Presiden mengeluarkan sebuah penetapan yang membentuk satu organisasi tentara yang bernama “Tentara Nasional Indonesia” sebagai penyempurnaan dari TRI.<sup>11</sup> Berdasarkan penetapan tersebut maka dari itu, secara resmi TNI dipisahkan dan berdiri tanggal 3 Juni 1947 dengan gabungan dari TRI, kesatuan biro perjuangan dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Awal Mula Keterlibatan Militer di Ranah Sipil**

Ketika kekuasaan Soeharto sebagai Presiden yang menjabat selama 32 tahun runtuh oleh gerakan mahasiswa yang menyebut diri mereka sendiri dengan nama gerakan reformasi pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut diiringi dengan bubarnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengakibatkan kemunculan Era Orde Baru yang di tandai dengan penandatanganan secara

---

<sup>10</sup> Febrinita Dwi Istyaningrum, “Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997)”, hlm. 28

<sup>11</sup> Hadi Nafis Kamil, “Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998”, hlm. 35

<sup>12</sup> Cholisin, *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya), hlm. 26. Lihat juga Soebijono, dkk., *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 15

resmi oleh Soekarno apa yang disebut dengan Super Semar (Surat Perintah 11 Maret).<sup>13</sup>

Kemudian saat Orde Baru runtuh, maka saat itu juga posisi ABRI/militer mengalami keruntuhan dikarenakan selama Orde Baru berlangsung militer sebagai alat pemerintahan yang berkuasa cenderung lebih mementingkan dan memelihara kekuasaan. Keruntuhan Orde Baru menjadi sebuah kesempatan tersendiri bagi rakyat, karena saat itu juga rakyat menuntut untuk dihapuskannya dwifungsi ABRI. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta lapangan penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 1996-1997 perihal harapan masyarakat peran sosial-politik ABRI, hasil penelitian tersebut sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kelompok pertama yaitu kelompok yang menentang dwifungsi ABRI. Prinsip kelompok ini yang berpegang teguh pada supremasi sipil dan memberikan izin pihak militer untuk terlibat dalam persoalan di luar militer saat keadaan darurat saja.
2. Kelompok kedua ini melibatkan MPR sebagai tempat ABRI berperan. Peranan tersebut diharapkan pihak ABRI terhindar dari kudeta.
3. Kelompok ketiga ini termasuk ke dalam golongan yang pragmatis dalam hal melihat dwifungsi ABRI. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini menganggap bahwa dwifungsi ABRI tidak bisa

---

<sup>13</sup> Petter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat*, terj. Tim Redaksi, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm. 124

<sup>14</sup> Nurhasanah Leni, "Keterlibatan Militer dalam Kancah Politik di Indonesia", hlm. 42

dihindarkan. Oleh sebab itu dalam politik riil kekuatan masih diperlukan. Walaupun begitu kelompok ini berharap agar realitas politik tidak dijadikan sebagai ukuran dalam mengambil kebijakan. Kemudian harapan lain dari kelompok ini peranan sosial-politik ABRI pada bidang kekaryaan harus disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Menurut kelompok ini ABRI dilihat sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa.

Menurut Salim Said awal mula keterlibatan militer dalam ranah sipil bersifat spontan dan komplementer terhadap peran dominan sipil.<sup>15</sup> Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kelompok sipil menjadi salah satu penyebab militer menduduki posisi-posisi sipil.<sup>16</sup> Melalui campur tangan yang dilakukan militer didorong oleh kepentingan politik tentara. Argumen tersebut diperkuat dengan fakta bahwa pada tahun 1957 saat keadaan darurat diberlakukan di berbagai wilayah akibat pemberontakan daerah, sebagian besar komposisi struktur politik di isi dari kalangan militer.<sup>17</sup>

Kemudian pada tanggal 19-20 Mei 2000 di Cilacap, Panglima TNI Laksamana Widodo mengadakan sebuah rapat pimpinan (Rapim) di mana hasil yang diperoleh dari rapim tersebut bahwa dengan tegas TNI tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis demi terlaksananya pembaharuan secara

---

<sup>15</sup> Cholisin, *Militer dan Gerakan Prodemokrasi: Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia*, 2002, hlm. 31

<sup>16</sup> Indra Samego, dkk., *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 23

<sup>17</sup> Hadi Nafis Kamil, "Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998", hlm. 69

menyeluruh dalam rangka kembali ke jati diri TNI yang sesungguhnya di bidang pertahanan negara.<sup>18</sup>

Saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden, ia memisahkan Polisi dari tubuh ABRI/militer. Hal itu membuat sebuah perubahan yaitu TNI berperan sebagai alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan dan POLRI berperan dalam bidang keamanan.<sup>19</sup> Konsekuensi dari pemisahan tersebut membawa nama Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) diubah menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) mengingat TNI tidak lagi bertugas dalam bidang keamanan.

### C. Sejarah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Saat rezim Orde Baru berlangsung pada tahun 1967 doktrin *Tri Ubaya Cakti* mengalami penyempurnaan kembali dan dirumuskannya konsep baru yaitu dwifungsi ABRI. Kemudian untuk meligitimasi konsep tersebut maka diperkenalkan Catur Dharma Ekakarma (Cadek).<sup>20</sup> Melalui doktrin tersebut ada empat matra tugas pokok ABRI yaitu satu perbuatan suci yang wajib diperjuangkan bersama untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, isi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Utama Pertahanan Keamanan No. KEP/B/177/1966 pada tanggal 21 November 1966 yang telah disahkan sebelumnya.<sup>21</sup> Doktrin tersebut dikonsolidasikan lagi menjadi doktrin *Tri Sad*

---

<sup>18</sup> Mohammad Sidiq, "Profesionalisme Militer Pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Kajian Perbandingan Sosial-Historis)", *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 1., Februari 2019, hlm. 30

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>20</sup> Rayni Wulansuci Siregar, "Peran dan Fungsi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi 1998-2011", *Tesis*, (Jakarta:Prodi Program Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 57

<sup>21</sup> Febrinita Dwi Istyaningrum, "Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1966-1997", hlm. 42

*Daya Dwi Bakti* pada tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI/ABRI, keamanan pulau nusantara, keamanan laut, kemananan udara, keamanan masyarakat dan pemeliharaan perdamaian dunia.<sup>22</sup>

Kemudian pada tanggal 12 April Tahun 2000 Pimpinan TNI menegaskan bahwa tugas pokok TNI sudah berubah secara signifikan. TNI tidak lagi mengemban tugas sosial politik dan tidak juga mengemban tanggung jawab bidang keamanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polisi. Hal tersebut dikarenakan tuntutan dari rakyat yang menginginkan dihapuskannya dwifungsi ABRI sehingga terciptanya pemikiran reformasi yang berkembang dalam TNI.<sup>23</sup>

Jenderal M. Jusuf selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menjabat pada tahun 1980 mencetuskan sebuah program yang diberi nama dengan ABRI Masuk Desa (AMD). Program ini mengambil sasaran utama untuk melaksanakan pembangunan pada wilayah pedesaan dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada wilayah tersebut. Selain itu juga, wilayah pedesaan memiliki potensi alam yang memadai sehingga terwujudnya proses pembangunan yang merata untuk mensejahterakan masyarakat.

Melalui program ini TNI mampu melaksanakan salah satu kegiatan operasi bhakti TNI yang secara langsung melihat bagaimana kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan kegiatan program ini yaitu TNI berharap agar prajurit dapat

---

<sup>22</sup> Kornelis Rikan, "Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya di Masa Pemerintahan Orde Baru Pada Tahun 1965-1998", *Artikel*, (Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2014), hlm. 11-12

<sup>23</sup> Wiyono Eko Prasetyo, *Militer dan Politik: Keikutsertaan Militer dalam Kancan Perpolitikan di Indonesia*, <https://ferli1982.wordpress.com>, diakses pada 7 April 2012

mengenal masyarakat, mengetahui adat istiadat dan budaya daerahnya, serta antara masyarakat dengan TNI saling mengenal dan memahami. Sehingga, kemanunggalan TNI dengan masyarakat mampu mendorong masyarakat kearah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>24</sup>

Kemudian program ini mempunyai tujuan lain yaitu untuk memperbaiki dan mempererat hubungan antara sipil dan militer yang menjauh disebabkan sikap angkuh dan arogan di dalam tubuh personil ABRI. Hal itu dikarenakan tingginya posisi ABRI dalam pemerintahan. Selain itu juga dengan adanya program ini ABRI mampu mengembalikan citranya dan memperkuat perannya sebagai organisasi yang mempunyai akar dalam ikatan sosial negara.<sup>25</sup>

Perjalanan program AMD selama kurang lebih 18 tahun mengalami kesuksesan tersendiri dan berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 1998 program ini mengalami sebuah pengunduran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Reformasi 1998, akibat dari reformasi 1998 mempengaruhi perkembangan AMD. Hal tersebut terjadi karena rakyat yang menuntut agar diperbaiki sistem pemerintahan, di mana rakyat yang tidak percaya terhadap rezim pemerintah yang bersifat sentralistis dan dikuasi oleh militer. Oleh karena itu menjadi salah

---

<sup>24</sup> Eny Purwattingsih, "Efektifitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XXI (3), Desember 2013, hlm. 130-131

<sup>25</sup> Isnu Novia Setiowati, Sumarno, "Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) Tahun 1980-1998", *Avatara, e-journal Pendidikan Sejarah*, Volume 3, Nomor I, Maret 2015, hlm. 103

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 108-110

satu alasan dilakukannya reformasi 1998. Kemudian, membuat semakin berkembangnya praktek KKN dan keterbatasan rakyat dalam hal mengeluarkan pendapat.

- b. Pemisahan POLRI dengan TNI, secara resmi pemisahan POLRI dari tubuh TNI terjadi pada tanggal 1 April 1999. Setelah terjadinya pemisahan yang dilakukan POLRI maka, ketika pelaksanaan AMD ke-61 pada tahun 2000 program ini yang awal mula bernama ABRI Masuk Desa (AMD) berganti menjadi TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Selang dua tahun berikutnya ketika pelaksanaan TMMD ke-65 terjadi pergantian nama kembali dari TNI Manunggal Masuk Desa menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan nama tersebut bertahan hingga saat ini. Selain terjadinya perubahan nama dampak dari pemisahan yang terjadi membuat berkurangnya jumlah personil yang turun ke lapangan dan diperbolehkan hanya dari TNI saja.
- c. Tuntutan Penghapusan Dwifungsi dan Militer Kembali ke Barak. Tuntutan ini terjadi karena peran sosial-politik yang dilakukan oleh militer membuat pihak sipil merasa ruang geraknya terbatas, disisi lain kecenderungan peran tersebut membuat tidak profesionalnya pihak militer. Tujuan lain dari tuntutan tersebut rakyat berharap agar TNI ataupun POLRI fokus terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Dampak yang terjadi terhadap tuntutan tersebut membuat pelaksanaan AMD yang awal mulanya dilaksanakan

sebanyak 3-4 kali selama satu tahun berubah menjadi dua kali dalam satu tahun.

#### **D. Definisi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)**

ABRI Masuk Desa (AMD) merupakan sebuah program kerjasama antara TNI dengan lintas sektoral, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah, serta Komponen Bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terisolasi, daerah pinggiran dan terbelakang.<sup>27</sup>

Sementara itu, dalam buku sewindu dijelaskan bahwa ABRI Masuk Desa salah satu bentuk keprihatinan TNI-ABRI terhadap permasalahan yang di hadapi oleh desa. Maka, TNI berusaha mencari solusi permasalahan tersebut secara bersama. Sovia pun menjelaskan bahwa program ABRI Masuk Desa selain membantu tugas pemerintahan dalam permasalahan bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Tidak lupa juga bahwa program ini memiliki tujuan tersendiri yaitu melaksanakan Operasi Bhakti ABRI.<sup>28</sup>

Bhakti ABRI merupakan pendayagunaan kemampuan TNI terhadap objek yang bersifat fisik material maupun mental spiritual dalam rangka menunjang pembangunan negara dan bangsa, tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan nasional. Kegiatan Bhakti ABRI dilaksanakan oleh prajurit dan

---

<sup>27</sup> Rya, "Mengulas Arti dan Tujuan Tentara Manunggal Membangun Desa", <https://sinfonews.com>, diakses pada 9 September, 2017

<sup>28</sup> Sovia Hasanah, "Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 30 Mei 2017

satuan TNI yang bersifat membantu, terintegrasi dan selalu terarah pada usaha penyuksesan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah didukung oleh seluruh Departemen, Pemerintah Daerah dan masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Stephen Adams salah satu cara untuk melegitimasi keterlibatan ABRI dalam bidang non-militer yaitu Bhakti ABRI dengan begitu bisa menunjukkan dedikasi ABRI dalam pelayanan sosial.<sup>30</sup>

Selain untuk menjalankan Operasi Bhakti ABRI, juga untuk meningkatkan kelancaran arus transportasi logistik ke kawasan perdesaan. Meningkatkan keamanan, serta mampu mendorong masyarakat untuk membangun desanya. Selaras dengan kegiatan tersebut, dalam agenda Nawacita Presiden RI dalam poin ketiganya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>31</sup> Kemudian dengan kegiatan ini membuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat makin erat. Sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional.

Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bagian dari pembinaan teritorial, dalam melaksanakan programnya dengan proses perencanaan, di mana dalam menjalankan proses tersebut mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah yang menjadi sasaran

---

<sup>29</sup> Parlan Pangumpia, dkk., "Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pembangunan Melalui Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Suatu Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado)", hlm. 2

<sup>30</sup> Isnu Novia Setiowati, Sumarno, "Perkembangan ABRI Masuk Desa (AMD) Tahun 1980-1998", hlm. 102-103

<sup>31</sup> Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98, Jakarta 9 Maret 2017

pelaksanaan program ini dengan menggunakan *bottom up planning system* yang dilaksanakan secara komprehensif dan integral.

#### **E. Landasan Pelaksanaan TMMD**

Pelaksanaan TMMD sendiri mempunyai lima poin sebagai dasar landasannya, yaitu:

- a. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep / 569 / V / 1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Pola Dasar Konkritisasi Kemanunggalan ABRI-Rakyat dan Pola Operasional TNI ABRI Masuk Desa.
- b. Surat Telegram Menhankam/Pangab Nomor: T / 648 / 1980 tanggal 26 Juli 1980 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Operasional TNI ABRI Masuk Desa.
- c. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep / 899 / IX / 1980 tanggal 5 September 1980 tentang Organisasi dan Tugas Penanggung Jawab Operasional TNI ABRI Masuk Desa.
- d. Instruksi Mendagri Nomor. 9 tahun 1985 tanggal 12 Maret 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI ABRI Masuk Desa.
- e. Surat Keputusan Penanggung Jawab Operasional TMMD Nomor: Skep / 01 / V / 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Pengangkatan Tim Asistensi dari Departemen dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen dalam Staf PJO TNI Manunggal  
Membangun Desa.<sup>32</sup>

## **F. Manfaat TMMD**

Terbentang luasnya wilayah nusantara dengan berbagai ciri khas masing-masing yang membutuhkan perhatian lebih, terutama pada pedesaan yang termasuk wilayah tertinggal/miskin/terisolir/terpencil. Sehingga membuat wilayah tersebut belum merasakan pemerataan pembangunan yang merupakan milik tanggung jawab bersama serta peran aktif dari masyarakat sendiri yang langsung merasakan hal tersebut.

Konteks pemerataan pembangunan untuk wilayah terisolir belum dirasakan oleh seluruh wilayah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kurangnya kepedulian pemerintah di tingkat daerah terhadap wilayah yang termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal/miskin/terisolir/terpencil. Maka dari itu mengapa masyarakat yang berada pada daerah tersebut belum seutuhnya merasakan taraf hidup dan kesejahteraan yang sebenarnya. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu sulitnya akses untuk mencapai wilayah tersebut.

Usaha untuk mengejar ketertinggalan wilayah yang tertinggal/miskin/terisolir/terpencil dilakukan dengan sebuah cara yaitu adanya program kebijakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang sebelumnya pada tahun 1980 dikenal dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD). Program kebijakan tersebut menjadi solusi dari permasalahan masyarakat desa

---

<sup>32</sup> Raden Bimo Delta, "TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-84 Rencana dan Sasaran", <https://military-family16.blogspot.com>, diakses pada 4 Oktober 2014

yang tertinggal/miskin/terisolir/terpencil, dengan adanya kebijakan itu satu demi satu membantu dan memperbaiki wilayah desa yang tertinggal/miskin/terisolir/terpencil. Program tersebut langsung dapat dirasakan masyarakat dengan sasaran fisik yang meliputi pembangunan jalan guna membuka akses desa, memperbaiki sekolah dan tempat ibadah. Kemudian untuk sasaran non fisik dilakukan berbagai penyuluhan, seperti penyuluhan bahaya mengkonsumsi narkoba, penyuluhan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum, penyuluhan keluarga berencana, dsb.

Manfaat dari kebijakan TMMD ini bagi masyarakat desa yang merasakan langsung yaitu meningkatkan taraf ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena keterbukanya akses jalan desa dan mempermudah jangkauan transportasi dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian manfaat lainnya jika dilihat dari konsep pertahanan rakyat yaitu membantu dalam menjaga kedaulatan NKRI yang menjadi tugas pokok TNI, sebagaimana yang diketahui bahwa TNI sebagai komponen inti sedangkan rakyat menjadi komponen pendukung. Hal tersebut akan terbangunnya sebuah konsep suasana interaksi yang positif antara militer-sipil.<sup>33</sup>

Selain itu di sisi lain dengan terlaksananya kebijakan TMMD ini memberikan manfaat positif bagi ketahanan wilayah. Eny Purwatiningsih berpendapat bahwa ketahanan wilayah itu sebuah kondisi masyarakat yang dinamik, di mana seluruh aspek kehidupan yang terpadu meliputi ketangguhan masyarakat dalam hal mencegah segala ancaman, tantangan, hambatan dan

---

<sup>33</sup> <https://tni.mil.id/view-3869-tmmd-dan-nilai-manfaatnya.html>, diakses pada 8 November 2006

gangguan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung guna untuk menjamin identitas dan integritas kelangsungan hidup dalam mendapatkan aspek ketahanan wilayah.<sup>34</sup>

Pelaksanaan kebijakan ini memberikan efektifitas tersendiri bagi wilayah desa yang menjadi sasaran TMMD. Menurut Arikunto untuk mengukur keefektifitasan suatu pelaksanaan kebijakan dapat di nilai dengan tiga kriteria yaitu produksi, efesiensi, dan kepuasan. Melalui tiga kriteria tersebut menjadi sebuah pertimbangan sendiri dalam hal penilaian yang digunakan oleh masyarakat desa yang menjadi sasaran. Ketiga kriteria tersebut juga secara tidak langsung bisa menjadi sebuah tolak ukur yang digunakan masyarakat sebagai acuan dalam mengapresiasi suatu program.<sup>35</sup>

Jika suatu program terlaksana secara efektif, maka masyarakat memberikan sebuah apresiasi dan simpati yang baik terhadap pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi, apabila masyarakat memberikan sebuah apresiasi yang buruk terhadap pelaksanaan suatu program dan simpati masyarakat berkurang, maka tujuan dari program tersebut tidak bisa dikatakan efektif.

Menurut Sugiyono salah satu kriteria efektivitas suatu program bisa dinilai dengan indikator dari tingkat kepuasan masyarakat yang merasakan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, Gibson berpendapat bahwa untuk

---

<sup>34</sup> Eny Purwatiningsih, "Efektifitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD) dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor Xix (3), Desember 2013, hlm. 132

<sup>35</sup> *Ibid.*

menentukan keefektivasitas suatu program dengan kriteria produksi, kriteria efisiensi, dan kriteria kepuasan masyarakat.

Mengukur keefektivasitas sebuah kegiatan berkaitan dengan perencanaan dan sumber daya anggaran dan sumber daya waktu. Ukuran keefektivasitas sebuah pelaksanaan program dapat dilihat melalui besaran dana dan waktu yang digunakan dalam merealisasikan kegiatan program. Apabila kegiatan program lebih kecil atau sama dengan alokasi dana dan waktu, maka program kegiatan tersebut bisa dikatakan efektif. Akan tetapi, jika besarnya dana dan waktu pelaksanaan yang digunakan lebih besar dari hasil yang ditetapkan dalam perencanaan suatu kegiatan maka, program tersebut dikatakan tidak efektif.<sup>36</sup>

#### **G. TNI di Mata Masyarakat**

Sebagaimana pemaparan pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa ketika Orba berlangsung selama 32 tahun saat Soeharto menjabat sebagai Presiden, pemerintahan lebih banyak dikendalikan dari kalangan militer sehingga, saat itu menjadikan citra militer buruk. Salah satu langkah awal untuk memperbaiki citra ABRI/TNI di mata masyarakat, yaitu dengan dihapuskannya dwifungsi ABRI/TNI.

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, perlahan TNI mampu mengembalikan lagi citra baiknya di mata masyarakat, di mana dulu masyarakat menganggap bahwa TNI musuh rakyat. Akan tetapi, saat ini terjalin hubungan antara militer dan sipil dengan baik dengan melaksanakan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 131-132

program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang tercantum dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Kemudian, dengan adanya tugas tambahan tersebut TNI mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali dalam membantu tugas pemerintah.

Sebagaimana penuturan langsung oleh Tono:

*“Menurut saya dengan adanya kegiatan TMMD yang digalangan langsung oleh TNI sangat membantu, karena manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, kegiatan tersebut menjadi salah satu menjaga keamanan NKRI secara tidak langsung.”<sup>37</sup>*

Kemudian, Randi berpendapat bahwa:

*“Tugas pokok dari TNI sudah tercantum untuk menjaga NKRI. Akan tetapi, saat ini TNI dalam menjaga NKRI dengan cara melakukan kegiatan TMMD. Menurut saya hal tersebut tidak menjadi masalah asalkan sesuai berdasarkan peraturan yang ada”.<sup>38</sup>*

---

<sup>37</sup> Tono, wawancara 17 September, di Sako, Kota Palembang

<sup>38</sup> Randi, wawancara 18 September, di Sako, Kota Palembang